



DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun dengan baik.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari kontribusi, dukungan, dan kerjasama berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada seluruh jajaran pegawai Dinas Kesehatan Kota Balikpapan serta pihak terkait lainnya.

LKjIP ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi bahan evaluasi dan pedoman penting dalam menyusun perencanaan pembangunan kesehatan daerah yang lebih baik dan efektif di masa mendatang.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan serupa di tahun-tahun berikutnya.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan,



Alwiati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja, maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan mewujudkan kinerja prioritas tersebut adalah dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan guna mewujudkan sasaran – sasaran yang ditargetkan dapat dicapai pada Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya pencapaian visi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman”.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Balikpapan, maka Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menindak lanjuti perwujudan visi dan misi tersebut sebagaimana terdapat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Adapun Misi Pemerintah Kota Balikpapan yang sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada RPJMD 2021-2026 yang menjadi perwujudan Dinas Kesehatan 2021-2026 dalam mencapai visi adalah Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi. Langkah-langkah yang diambil dalam penjabaran pelaksanaan Misi Kedua Pemerintah Kota Balikpapan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menetapkan Tujuan untuk pelaksanaan pembangunan yaitu : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dirumuskan beberapa sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya Angka Harapan Hidup dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Angka Harapan Hidup;
2. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Tahun 2025 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka capaian Indikator Kinerja Utama dari Sasaran Strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Angka Harapan Hidup dengan Indikator Kinerja Angka Harapan Hidup di tahun 2025 sebesar 76,24 dengan capaian 100,04% mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024, sehingga termasuk kategori melebihi target;
2. Realisasi Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Indikator Kinerja Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yaitu 81,66 dengan capaian 100,07% juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024, sehingga termasuk kategori melebihi target.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan antara Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Matrik Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam mewujudkan Visi dan Misi telah menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama. Adapun capaian indikator kinerja utama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian tujuan Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Usia Harapan Hidup yaitu sebesar 100,40%, sehingga termasuk kategori melebihi target;
2. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja utama Jumlah Kematian Ibu yaitu sebesar 80%, sehingga termasuk kategori tidak tercapai;
3. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja utama Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) yaitu sebesar 92,45%, sehingga termasuk kategori tidak tercapai;

4. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja utama Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) yaitu sebesar 94,99%, sehingga termasuk kategori tidak tercapai;
5. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja utama Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) yaitu sebesar 99,42%, sehingga termasuk kategori tidak tercapai;
6. Capaian sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator kinerja utama Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yaitu sebesar 100,07%, sehingga termasuk kategori melebihi target.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kesehatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan berdasarkan indikator tersebut dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 khususnya Tahun Anggaran 2025 menunjukkan capaian pada 2 (Dua) indikator sasaran telah tercapai/melebihi target. Sedangkan pencapaian target kinerja dicantumkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 – 2029 khususnya Tahun Anggaran 2025 yang diukur berdasarkan Hasil Evaluasi LKJIP menunjukkan capaian 2 (dua) indikator tercapai/melebihi target dan 4 (empat) indikator yang tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kesehatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dan terus berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan

kesehatan berdasarkan indikator tersebut dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR GRAFIK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.3.1 Maksud	2
1.3.2 Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	4
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	28
1.5.1 Tantangan	28
1.5.2 Peluang	30
1.6 Sistematika Penulisan	31
BAB II PERENCANAAN KINERJA	33
2.1 Perencanaan Strategis	33
2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	50
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	71
3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	71
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	77
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	79
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir	81

3.2.3	Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	85
3.2.4	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	88
3.2.5	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	93
3.2.6	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	109
3.2.7	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	143
3.3	Realisasi Anggaran Tahun 2025	156
3.4	Prestasi Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	166
BAB IV PENUTUP		170
4.1	Kesimpulan	170
4.2	Rekomendasi	171
LAMPIRAN		172

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	35
Tabel 2. 2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	36
Tabel 2. 3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	38
Tabel 2. 4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025 ...	51
Tabel 2. 5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	53
Tabel 2. 6	Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025	57
Tabel 2. 7	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	57
Tabel 2. 8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	58
Tabel 2. 9	Rencana Anggaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan..	60
Tabel 3. 1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas	71
Tabel 3. 2	Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025	71
Tabel 3. 3	Predikat Capaian Kinerja	78
Tabel 3. 4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	79
Tabel 3. 5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	80
Tabel 3. 6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	82
Tabel 3. 7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	83
Tabel 3. 8	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026	85
Tabel 3. 9	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029	86
Tabel 3. 10	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	89
Tabel 3. 11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas	

	Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)	91
Tabel 3. 12	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025.....	94
Tabel 3. 13	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atau Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	98
Tabel 3. 14	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra	109
Tabel 3. 15	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menurut jabatan dan Jenis Kelamin ..	144
Tabel 3. 16	Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan.....	145
Tabel 3. 17	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.....	147
Tabel 3. 18	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	152
Tabel 3. 19	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029	153
Tabel 3. 20	Penyerapan Anggaran Belanja pada Tahun 2025.....	157
Tabel 3. 21	Prestasi Dinas Kesehatan Tahun 2025	166

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	6
Gambar 3. 1 Inovasi GEMPUR STUNTING	140
Gambar 3. 2 Inovasi SAYUNARA	141
Gambar 3. 3 Inovasi TELETABIS.....	142

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3. 1 Angka Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025	90
Grafik 3. 2 Nilai SAKIP Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era dimana didengungkannya perjalanan roda pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Governance* yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah serta mengingat arti pentingnya akuntabilitas kinerja, maka salah satu wujud upaya untuk mengetahui dan mewujudkan kinerja prioritas tersebut adalah dengan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini merupakan parameter yang berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* melalui dokumen pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik untuk mengetahui keuangan organisasi/instansi dalam pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran organisasi tersebut dan sebagai media evaluasi yang efektif bagi upaya perbaikan kinerja instansi pemerintah.

Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaksanakan kewajiban untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Penyajian Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mengacu pada:

- a. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Surat Nomor 000.8.6.3/3/E/SETDA dari Sekretariat Daerah Kota Balikpapan tanggal 02 Januari 2026 tentang Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Dalam rangka pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang tepat, jelas, terukur dan akuntabel, maka instansi Pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah harus menyusun LAKIP.

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Laporan Kinerja merupakan alat untuk melaksanakan AKIP.

Penyusunan Laporan Kinerja dimaksud untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi Pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi Pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3.2 Tujuan

- 1 Mewujudkan akuntabilitas instansi Pemerintah kepada pihak pemberi amanat;
- 2 Pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan dari unit yang lebih rendah kepada unit kerja yang lebih tinggi;
- 3 Perbaikan dalam perencanaan khususnya jangka menengah dan pendek;
- 4 Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam Tahun Anggaran 2024;
- 5 Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada Tahun 2024;
- 6 Hasil evaluasi yang berupa kritikan dan saran diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dalam peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun selanjutnya dan yang akan datang.

1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah

1.4.1 Dasar Pembentukan Organisasi

- a. Dasar Pembentukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008;
- b. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

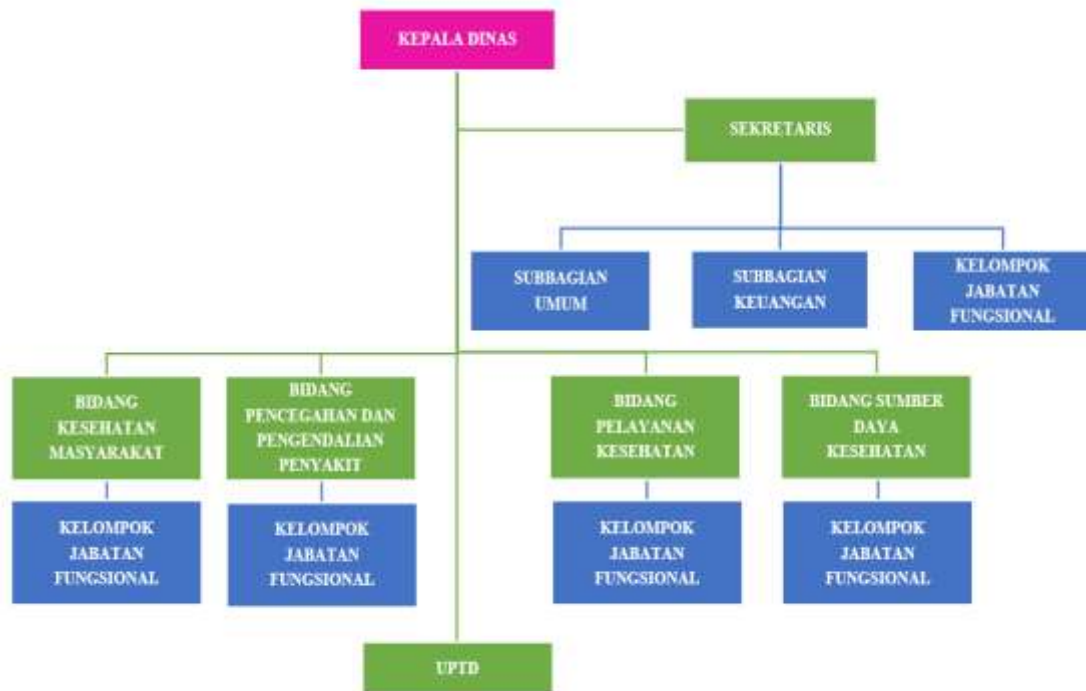
1.4.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

I. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional:
 - a. Substansi Kesehatan Keluarga;
 - b. Substansi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan;
 - c. Substansi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Substansi Surveillans dan Imunisasi;

- b. Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - b. Substansi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- 5. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Substansi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - b. Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - c. Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:
 - a. Substansi Kefarmasian;
 - b. Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
 - c. Substansi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan .
- 8. UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah).



Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Sumber : Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022

II. Tugas dan Fungsi

1. Kepala Dinas Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- Menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian internal terhadap unit kerja di bawahnya; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan;
- Perumusan, penetapan dan pelaksanaan operasional di bidang kesehatan;

- c. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas , pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada UPT Dinas;
- d. Pelaksanaan pembinaan seluruh fasilitasi pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan tradisional di daerah;
- e. Pengelolaan kesekretariatan Dinas;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian:

- a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja;
- b. Administrasi Keuangan;
- c. Administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- d. Administrasi kepegawaian;
- e. Administrasi umum;
- f. Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- h. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- i. Layanan informasi dan pengaduan; dan
- j. Pembinaan pelayanan publik.

Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan;
- b. pengkoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- c. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- e. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kepustakaan;
- f. pelaksanaan administrasi kantor dan pembinaan kepegawaian;
- g. pengelolaan anggaran Dinas dan penerimaan Dinas;
- h. pelaksanaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j. pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- k. pengelolaan survey kepuasan masyarakat;
- l. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- m. pengelolaan informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi pejabat pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pelaksana;
- n. pengoordinasian pengelolaan, pengembangan sistem teknologi informasi;
- o. pengoordinasian bidang dan UPTD;

- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Sekretariat terdiri atas:

- a. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
 - melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
 - mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
 - melaksanakan urusan rumah tangga , keamanan kantor dan mempersiapkan sarana dan prasarana kantor;
 - menyusun rencana kebutuhan alat kantor, barang inventaris kantor/rumah tangga;
 - melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - melaksanakan pencatatan, pengadministrasian dan pengelolaan barang milik daerah;
 - melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventaris barang;
 - menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 - menyelenggarakan pengelolaan pelaporan dan evaluasi kinerja pegawai;
 - menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;

- mengkoordinir penyusunan kebijakan bidang kesehatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Subbagian Keuangan, mempunyai tugas:

- menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran;
- mengkoordinir penyusunan rencana kerja dan anggaran/dokumen pelaksanaan anggaran;
- melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan;
- melaksanakan verifikasi dan rekonsiliasi harian penerimaan retribusi;
- menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- mengkoordinir dan meneliti anggaran;
- menyusun laporan keuangan;
- melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Substansi Program mempunyai tugas :

- melaksanakan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang meliputi :

- 1) rencana strategis;
 - 2) rencana kerja;
 - 3) rencana kerja tahunan;
 - 4) penetapan kinerja; dan
 - 5) laporan kinerja.
- melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan;
 - melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
 - melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
 - mengoordinasikan pembangunan, pengembangan pemeliharaan aplikasi dengan bidang;
 - melaksanakan pengamanan hardware maupun software terhadap aplikasi yang digunakan secara bersama lintas bidang;
 - melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - mengelola informasi, dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 - memfasilitasi penyusunan standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
 - menyusun tatalaksana dan tata kelola penanganan pengaduan dan pemberian informasi;
 - melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan serta informasi layanan dan pengaduan;

- memfasilitasi pembinaan tata kelola pelayanan publik;
- menyusun laporan pelaksanaan dan kegiatan Dinas;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi pengendalian dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat.

Bidang Kesehatan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan,

- pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
- e. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan / atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

- a. Substansi Kesehatan Keluarga, mempunyai tugas:
 - menyusun program dan kegiatan Substansi Kesehatan Keluarga;
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga;
 - menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga berdasar siklus kehidupan;
 - melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.
- b. Substansi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan kesehatan Lingkungan, mempunyai tugas:
- menyusun program dan kegiatan Substansi Promosi, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan;
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
 - melaksanakan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
 - memberikan bimbingan teknis dan supervisi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
 - memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesehatan lingkungan;
 - melaksanakan pemberian layanan rekomendasi dan sertifikasi laik sehat;
 - melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

c. Substansi Gizi, Kesehatan Kerja dan Olah Raga, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi gizi, kesehatan kerja dan olah raga;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja, dan kesehatan olahraga;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan gizi, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan gizi kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang pencegahan dan Pengendalian penyakit mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan Napza;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. Penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans, imunisasi, pencegahan penyakit menular, pengendalian penyakit menular, pencegahan penyakit tidak menular, pengendalian penyakit tidak menular, dan kesehatan jiwa dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri dari atas:

a. Substansi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan Substansi Surveilans dan Imunisasi;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- memberikan bimbingan teknis di bidang surveilans dan imunisasi;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- melaksanakan surveilans, mengolah dan menganalisa data penyakit, bencana, dan imunisasi;
- mengembangkan jejaring surveilans penyakit dan bencana;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

b. Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- memberikan bimbingan teknis di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan penyakit menular dan pengendalian penyakit menular;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

c. Substansi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- memberikan bimbingan teknis di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan.

Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan/atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

a. Substansi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi pelayanan kesehatan primer;
- mengkoordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan primer;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer;
- melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer;
- melaksanakan penatausahaan pembiayaan penerima bantuan iuran kesehatan;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

b. Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi pelayanan kesehatan rujukan;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan;
- melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan;
- melaksanakan kegiatan sistem informasi rumah sakit;
- melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medik dasar/ kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan;
- melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawat daruratan terpadu (public safety center);
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

- c. Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas;
- menyusun program dan kegiatan sesuai substansi pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
 - menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang mutu pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
 - melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
 - memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
 - memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan;
 - menyiapkan bahan rekomendasi/ saran teknis perizinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

6. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan.

Bidang Sumber Daya Kesehatan melaksanakan tugas:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang sumber daya kesehatan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- e. pemantauan evaluasi, dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pengelompokan substansi Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan uraian tugas yang terdiri atas:

- a. Substansi Kefarmasian, mempunyai tugas:
 - menyusun program dan kegiatan substansi kefarmasian, yang meliputi obat, makanan, minuman, kosmetika, obat tradisional dan bahan berbahaya;

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kefarmasian;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kefarmasian;
- melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya di bidang kefarmasian;
- menyiapkan bahan penerbitan/ pencabutan sertifikat produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga;
- menyiapkan bahan penerbitan sertifikat laik sehat terhadap pangan siap saji, uji sampel, izin iklan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

b. Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;

- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- melaksanakan pengawasan alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- menyiapkan bahan penerbitan/ pencabutan sertifikat produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga perusahaan rumah tangga serta tindak lanjut hasil pengawasan;
- memberikan rekomendasi perizinan penyalur alat kesehatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

c. Substansi Sumber Daya Manusia dan Sarana Kesehatan, mempunyai tugas:

- menyusun program dan kegiatan substansi sumber daya manusia dan sarana kesehatan
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana dan sarana kesehatan;
- menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- merencanakan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
- melaksanakan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan dan nonkesehatan;
- memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang sumber daya manusia dan sarana kesehatan;
- melaksanakan peningkatan dan pembangunan sarana kesehatan;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/ atasan terkait dengan bidang tugasnya.

1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dinas Kesehatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, baik internal maupun eksternal. Permasalahan utama yang dihadapi adalah adanya dinamika perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Dinamika perubahan tersebut antara lain perubahan atau kemajuan teknologi, dinamika perkembangan regional dan global, perubahan sistim dan tatanan kehidupan, perubahan sosial ekonomi dan budaya, perubahan tingkat ekspektasi masyarakat, dan lain-lain.

Identifikasi terhadap tantangan merupakan identifikasi terhadap kendala yang bersifat negatif yang akan dihadapi oleh suatu organisasi yang apabila berhasil diatasi akan memberikan peran yang besar dalam mencapai tujuan organisasi. Peluang merupakan suatu keadaan positif yang apabila dimanfaatkan oleh sebuah organisasi dapat memberikan dampak yang besar terhadap tujuan organisasi. Analisa terhadap kedua faktor tersebut bermanfaat untuk melakukan perencanaan dalam upaya mengantisipasi masa depan dengan melakukan pengkajian berdasarkan pengalaman masa lampau, didukung oleh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki saat ini akan diproyeksikan kepada pengembangan pelayanan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

1.5.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Penurunan Angka Kematian Ibu, bayi dan Balita yang masih belum optimal
2. Masih tingginya kesakitan dan kematian akibat penyakit menular, tidak menular, system surveilans dan kasus Kejadian Luar Bisa lainnya
3. Belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh, terutama stunting, dan permasalahan gizi ganda (gizi kurang dan gizi lebih)
4. Belum optimalnya upaya Promosi Kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Kawasan Sehat Tanpa Rokok (KSTR) menuju Kota Sehat.
5. Belum optimalnya Upaya Penyehatan Lingkungan
6. Perlunya peningkatan upaya ketersediaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam suatu sistem pembiayaan dan penjaminan pelayanan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Kota Balikpapan, yang pada saat ini sudah dilaksanakan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik sehingga mutu pelayanan kesehatan dan cakupan pelayanan kesehatan dapat lebih ditingkatkan melalui Akreditasi Fasilitas Kesehatan
8. Belum meratanya pemenuhan jumlah, jenis, kompetensi serta distribusi sumber daya manusia kesehatan, dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenagaan kesehatan.
9. Terbatasnya ketersediaan aset berupa lahan/tanah untuk pengembangan bangunan sarana kesehatan
10. Digitalisasi Sistem Layanan Kesehatan
11. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal, termasuk pembudayaan Germas dan Forum Kota Sehat.

1.5.2 Peluang

Peluang yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan dalam pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan diantaranya :

1. Posisi geografis Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Kalimantan Timur, Kota jasa, Kota MICE dan penyangga IKN.
2. Banyaknya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta (RS, Klinik, Laboratorium) yang ada di Kota Balikpapan
3. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah terakreditasi merupakan peluang dalam peningkatan mutu pelayanan dan pembangunan kesehatan.
4. Sumber dana pembiayaan kesehatan yang tidak hanya bersumber dari APBD tetapi juga dari APBD Provinsi, APBN dan Swasta merupakan peluang dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan dan pembangunan kesehatan.
5. Tingginya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan kesehatan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan terkait kesehatan. Kebijakan yang sudah dilakukan antara lain memenuhi kebutuhan anggaran kesehatan dan melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional.
6. Keberadaan stakeholder seperti fasilitas pelayanan kesehatan swasta, tokoh masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi kesehatan, perguruan tinggi, media massa/pers, dunia usaha dan organisasi perangkat daerah lainnya merupakan peluang yang potensial untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan melalui penggerakan dan pemberdayaan seluruh stakeholder yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 :

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun sebelumnya
- 3.2 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025
 - 3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 - 3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis
 - 3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

- 3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan
- 3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)
- 3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025.
- 3.4 Prestasi Tahun 2025

IV. PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Kesehatan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kecerdasan dan produktifitas sumber daya manusia. Sejalan kebijakan desentralisasi telah membawa dampak positif terhadap kemajuan Kota Balikpapan, namun demikian kecenderungan positif tersebut juga diikuti dengan kecenderungan yang menghawatirkan dimana terjadi berbagai hal sebagai ekspek pembangunan.

Berbagai kecenderungan terkait dengan sektor kesehatan, dimana kecenderungan yang menghawatirkan diantaranya ancaman penyakit menular, meningkatnya penyakit tidak menular termasuk penyalahgunaan narkoba, permasalahan kesehatan lingkungan, ancaman penyakit dari lingkungan kerja dan kesehatan sanitasi makanan yang kurang yang memerlukan upaya penataan bangkit Kembali melalui percepatan Transformasi Sistem Kesehatan. Namun demikian juga diikuti kecenderungan positif antara lain meningkatnya anggaran kesehatan pemerintah untuk masyarakat miskin dan penanggulangan masalah yang termuat dalam *Sustainable Development Goal's* (SDG's) yang belum tercapai, meningkatnya peran masyarakat dan swasta, berkembangnya lembaga pelayanan kesehatan swasta, meningkatnya gerakan mutu pelayanan kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, penelitian dan studi banding sektor kesehatan serta peningkatan capaian indikator Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (SPM).

Perencanaan strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota

Balikpapan Tahun 2021–2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagai berikut:

Visi : "Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman"

Visi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan dijabarkan dalam 5 misi, yakni:

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi
3. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Memadai
4. Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan
5. Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif

Dari Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan diatas terkait bidang kesehatan ada pada misi ke 2 yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Tinggi.**

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Indeks Kesehatan	Nilai	0,8383	0,8385	0,8388	0,8391	0,8394	0,8397
	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74,49	74,5	74,52	74,54	74,56	74,58
	Meningkatnya Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	N/A	27,00	28,75	30,50	32,25	34,00

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut, sebagai berikut:

Visi : Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Iman

Dalam rangka mencapai perwujudan visi tersebut diatas, maka misi Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Membangun Dan Mengembangkan Pemerintah Yang Bersih Dan Professional Berorientasi Pada Pelayanan Masyarakat;
2. Membangun Dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu Yang Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan;
3. Membangun Dan Mengembangkan Kehidupan Sosial Yang Kondusif Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Sehat Dan Terdidik;
4. Mengembangkan Perekonomian Yang Tumbuh Berkeadilan Untuk Semua;
5. Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup Yang Sehat Dan Nyaman Untuk Semua.

Dari Misi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan diatas terkait bidang kesehatan ada pada misi ke 3 yaitu **Membangun Dan Mengembangkan Kehidupan Sosial Yang Kondusif Untuk Menciptakan Masyarakat Yang Sehat Dan Terdidik.**

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan, sasaran, dan target Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Meningkatnya derajat kesehatan		Usia Harapan Hidup (UHH)	tahun	75,87	75,94	76	76,23	76,47	76,7

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	jiwa	9	5	5	5	4	4
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	24,80	23,06	21,45	19,95	18,55	17,25
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	84	84,98	85,73	86,48	87,23	87,98
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	104	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,45	81,45	81,76	81,87	81,99	82,12

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian

kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran [nama perangkat daerah] Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatn ya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8394	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,94			
Meningkatn ya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,56	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenanga n Daerah Kab/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
				Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	23,06			Pembangunan Puskesmas
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	84,98			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99,5			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
								Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
								Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Fasilitas Pelayanan Kesehatan
								Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
								Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
								Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
							Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Berpotensi Bencana
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
								Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
								Pengelolaan Surveilans Kesehatan
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
								Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
								Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat
								Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional
								Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
								Operasional Pelayanan Rumah Sakit
								Operasional Pelayanan Puskesmas
								Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
								Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
								Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
								Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
								Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
								Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan Usia
								Pengelolaan Layanan Imunisasi
								Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan sistem informasi kesehatan
							Penerbitan Izin RS Kelas C, D Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
								Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan
								Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
						Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kab/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
								Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perijinan praktik tenaga kesehatan
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Untuk UKP dan UKM Di Wilayah Kabupaten Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia
								Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Kesehatan Sesuai Standar
								Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
							Pengembangan Mutu Dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sdmk Tingkat Daerah Kab/Kota	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDMK
						Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
							Pemberian Sertifikat Produksi Untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Penebitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan pengawasan serta TL pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor P-IRT sbg IP utk PMMT yg dapat diproduksi oleh IRT
							Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaa n Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran Dan Depot Air Minum (DAM)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
							Penerbitan Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan< Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
							Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
							Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat Tingkat Daerah Kab/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Meningkatnya Profesionalitas dan	Indeks Reformasi Birokrasi	32,25	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Dinas Kesehatan	81,45	Program Penunjang Urusan	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Transparansi Birokrasi			Instansi Pemerintah	Kota Balikpapan		Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Perangkat Daerah	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
								Pengadaan Mebel
								Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Operasional atau Lapangan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Peningkatan Pelayanan Blud	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumber : Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

2.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor : 440/748/Dinkes tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor : 440/190.3/Dinkes Tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.	Rata-rata semua umur dari seluruh kematian pada suatu tahun tertentu	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.	Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 tentang Petunjuk	Penilaian oleh APIP (Inspektorat Kota Balikpapan)	Dinas Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.		

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor : 440/748/Dinkes

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, Dinas Kesehatan kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025–2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Renstra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor : 400.7/03/Dinkes tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.	Badan Pusat Statistik	Dinas Kesehatan
2.	Meningkatnya Akses dan Mutu	Jumlah Kematian Ibu	Kematian perempuan selama kehamilan atau	Jumlah Total Kematian Ibu dalam 1 tahun.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kesehatan Masyarakat		dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri.			
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persentase balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks tinggi badan atau panjang badan menurut usia (TB/U) atau (PB/U) memiliki Z-score kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.	(Jumlah balita usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi pendek dan sangat pendek dibagi Jumlah balita usia 0-59 bulan yang diukur PB atau TB) x 100%.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Angka keberhasilan pengobatan	Angka yang menggambarkan bagian dari	Jumlah semua kasus TBC diobati yang	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		tuberkulosis (treatment success rate)	seluruh kasus tuberkulosis yang ditemukan dan diobati, yang mendapat pengobatan lengkap dan sembuh.	memiliki hasil akhir pengobatan sembuh dan pengobatan lengkap diantara Jumlah semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan dikali 100% .		
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	Cakupan peserta merupakan setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.	Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dibagi dengan jumlah penduduk dikali 100.	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Angka yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang diukur melalui evaluasi Sistem	diperoleh dari evaluasi internal yang dilakukan oleh inspektorat daerah (berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor	Penilaian oleh APIP (Inspektorat Kota Balikpapan)	Dinas Kesehatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai ini mencerminkan seberapa baik perangkat daerah tersebut dalam merencanakan melaksanakan, mengukur, dan melaporkan kinerjanya.	88 Tahun 2021, tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Nilai Evaluasi AKIP = Nilai komponen perencanaan kinerja+ Nilai komponen pengukuran kinerja+ Nilai Komponen Pelaporan Kinerja+ Nilai Evaluasi Akuntabilitas.		

Sumber : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nomor : 400.7/03/Dinkes

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen komitmen kinerja perangkat daerah yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, yang memuat sasaran, indikator, dan target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan yang berlaku, guna memberikan gambaran komitmen perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun perjanjian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74,56
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,45

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

Berdasarkan evaluasi kinerja , target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Murni Tahun 2025 (Tabel 2.6) mengalami penyesuaian melalui Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Tabel 2.7). Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan capaian realisasi tahun 2024, sehingga target yang semula ditetapkan dapat lebih realistis dan sesuai dengan kondisi aktual. Dengan demikian, perubahan ini mencerminkan upaya penyelarasan antara perencanaan awal dengan perkembangan hasil yang telah dicapai.

Tabel 2. 7 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	75,87	75,94
2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,45	81,60

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

Sehubungan dengan tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, maka subbab ini juga menyajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 (periode terbaru). Penyusunan Perjanjian Kinerja ini dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan.

Tabel 2. 8 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,87	75,94
1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	9	5
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	24,80	23,06
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	84	84,98
		Cakupan kepesertaan jaminan	%	104	99,5

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		kesehatan nasional (JKN)			
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,45	81,60

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar Rp. 653.714.855.707,00. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar Rp. 611.750.869.506,00, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 9 Rencana Anggaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
I.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	75,94	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240,639,307,924.00	
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55,768,970,482.00	
				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4,218,000,000.00	APBD-P
				Pembangunan Puskesmas	13,746,700,000.00	APBD-P
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4,923,050,000.00	APBD-P
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4,000,000,000.00	APBD-P
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13,384,452,482.00	APBD-P
				Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	350,000,000.00	APBD-P
				Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	878,582,000.00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14,268,186,000.00	APBD-P
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183,613,084,197.00	
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1,780,282,340.00	APBD-P / APBN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	219,136,200.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	489,647,230.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	499,146,225.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,192,815,855.00	APBD-P / APBN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	571,974,382.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	738,611,750.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	143,581,800.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	418,237,180.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	333,014,000.00	APBD-P / APBN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1,060,306,130.00	APBD-P / APBN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	317,022,000.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	148,578,042.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	149,170,000.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17,759,612,810.00	APBD-P / APBN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	326,691,550.00	APBD-P / APBN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	628,134,630.00	APBD-P / APBN
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,454,807,235.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	156,675,950.00	APBD-P
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2,830,269,570.00	APBD-P / APBN
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	368,521,100.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	72,378,200.00	APBD-P
				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan	62,280,000.00	APBD-P
				Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	5,184,439,290.00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	100,315,795,774.00	APBD-P
				Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	34,800,000.00	APBN
				Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	235,995,250.00	APBD-P
				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5,831,900,000.00	APBD-P
				Operasional Pelayanan Puskesmas	31,603,597,158.00	APBD-P / APBN
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,734,732,056.00	APBD-P
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	107,168,950.00	APBD-P
				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1,799,731,070.00	APBD-P
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	114,910,870.00	APBD-P
				Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	182,578,200.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	67,295,700.00	APBD-P /APBN
				Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	166,850,000.00	APBD-P
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	627,865,500.00	APBD-P /APBN
				Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	427,336,700.00	APBN
				Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usia	127,150,000.00	APBN
				Pengelolaan Layanan Imunisasi	183,398,500.00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	146,645,000.00	APBD-P
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	612,636,000.00	
				Pengelolaan sistem informasi kesehatan	612,636,000.00	APBD-P / APBN
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	644,617,245.00	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	59,590,000.00	APBD-P
				Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74,294,000.00	APBD-P
				Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	111,278,720.00	APBD-P
				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	399,454,525.00	APBD-P
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2,547,928,000.00	
				Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	217,964,000.00	
				Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	68,600,000.00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perijinan praktik tenaga kesehatan	149,364,000.00	APBD-P
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	200,192,000.00	
				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia	60,840,000.00	APBD-P
				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	19,966,000.00	APBD-P
				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119,386,000.00	APBD-P
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,129,772,000.00	
				Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	2,129,772,000.00	APBD-P
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1,335,318,278.00	
				Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	274,190,600.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	274,190,600.00	APBD-P
				Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	191,245,475.00	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	191,245,475.00	APBD-P
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	619,036,203.00	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	619,036,203.00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25,200,000.00	
				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25,200,000.00	APBD-P
				Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75,000,000.00	
				Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75,000,000.00	APBD-P
				Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	150,646,000.00	
				Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	150,646,000.00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2,903,425,555.00	
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,100,000,000.00	
				Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	2,100,000,000.00	APBD-P / APBN
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335,168,225.00	
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	335,168,225.00	APBD-P
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468,257,330.00	
				Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	468,257,330.00	APBD-P / APBN
II.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	81,60	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364,324,889,749.00	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128,575,000.00	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128,575,000.00	APBD-P
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	198,573,236,179.00	
				Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	198,573,236,179.00	APBD-P
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,592,811,470.00	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15,000,000.00	APBD-P
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	112,826,970.00	APBD-P
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000.00	APBD-P
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	452,810,000.00	APBD-P
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288,374,500.00	APBD-P
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000.00	APBD-P
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000.00	APBD-P
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	599,550,000.00	APBD-P
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24,250,000.00	APBD-P
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,040,164,600.00	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	624,000,000.00	APBD-P
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199,385,000.00	APBD-P
				Pengadaan Mebel	1,300,000,000.00	APBD-P

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Program/kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran	Keterangan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	885,000,000.00	APBD-P
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3,031,779,600.00	APBD-P
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,795,150,000.00	
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	550,150,000.00	APBD-P
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1,245,000,000.00	APBD-P
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,773,991,500.00	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	150,000,000.00	APBD-P
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2,200,000,000.00	APBD-P
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000.00	APBD-P
				Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1,390,359,000.00	APBD-P
				Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	833,632,500.00	APBD-P
				Peningkatan Pelayanan BLUD	151,420,961,000.00	
				Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	151,420,961,000.00	APBD-P
				Jumlah	611,750,869,506.00	

Sumber : DPA Perubahan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2024 atas penilaian Tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas

No	Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai 2025
1	Perencanaan Kinerja	30	24,57
2	Pengukuran Kinerja	30	25,17
3	Pelaporan Kinerja	15	11,57
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,35
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	81,66
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

Rekomendasi Laporan hasil evaluasi atas implementasi AKuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 2 Matriks Tindak Lanjut Implementasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

No.	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	Agar pohon kinerja yang disusun sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon	Telah disusun Pohon Kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan pohon

No.	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		kinerja dan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja	kinerja dan dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja sebagaimana diatur dalam Permen PANRB No.89 Tahun 2021
		Agar meningkatkan pemanfaatan dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan	Telah dilakukan survei internal kepada pegawai untuk mengetahui pemahaman dan kepedulian serta komitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan. Dari hasil survei telah didapatkan masukan untuk rencana tindakan perbaikan dan untuk tahun 2025 survei internal akan dilaksanakan per semester sehingga akan didapatkan evaluasi berkelanjutan sehingga seluruh pegawai memahami, peduli, dan berkomitmen terhadap pencapaian kinerja yang telah direncanakan.
		Agar rincian rencana aksi yang disusun mendukung	Rincian rencana aksi telah disusun untuk

No.	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		tercapainya Perjanjian Kinerja	mendukung tercapainya Perjanjian Kinerja
2.	Pengukuran	Agar setiap pegawai meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja	Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian atas hasil pengukuran kinerja pegawai, Dinas Kesehatan akan melakukan beberapa kegiatan, diantaranya : 1. Mengadakan pelatihan pegawai (Capacity Building) secara rutin yang salah satu materi didalamnya adalah bagaimana hasil pengukuran kinerja tersebut terkait langsung dengan tujuan dan keberhasilan pegawai serta Dinas Kesehatan 2. Melakukan evaluasi pengukuran kinerja pegawai secara berkala dan memberikan umpan balik yang membangun yang tidak hanya berfokus

No.	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
			pada kelemahan pegawai tetapi juga apresiasi terhadap kinerja pegawai
		Agar pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) ditingkatkan dan terintegrasi	1. Monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja Dinas Kesehatan telah dilaksanakan berkala setiap triwulan dan hasilnya diinput kedalam aplikasi REAKSI Bappeda 2. Pengukuran kinerja pegawai Dinas Kesehatan telah dilaksanakan dengan menginput pada aplikasi kinerja.bkn.go.id dan ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kinerja pegawai
		Agar pengukuran kinerja memanfaatkan teknologi informasi yang mencakup pengukuran kinerja secara berjenjang dan terintegrasi dari pimpinan perangkat	Pengukuran kinerja pegawai Dinas Kesehatan telah memanfaatkan teknologi informasi dengan menginput pada aplikasi kinerja.bkn.go.id ,

No.	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
		daerah sampai ke tingkat individu pegawai	aplikasi REAKSI, dan e-SPM Bangda serta ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi terhadap hasil kinerja pegawai mulai dari pimpinan hingga tingkat individu
		Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja agar seluruh capaian kinerja tahun berikutnya lebih tinggi dari capaian kinerja saat ini	Guna meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja Dinas Kesehatan melakukan beberapa hal diantaranya : 1. Melakukan evaluasi secara rutin dan melakukan analisa terhadap capaian tahun sebelumnya 2. Menetapkan sasaran dan target kinerja sesuai dengan konsep SMART (Specific , Measurable , Achievable , Relevant , dan Time-bound 3. Pelatihan dan pengembangan pegawai Dinas Kesehatan

No.	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Melakukan berbagai inovasi bidang kesehatan dengan inovator dari pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dan Puskesmas
3.	Pelaporan Kinerja	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya namun seluruh pegawai tetap meningkatkan kepedulian pada penyajian informasi dalam laporan kinerja	Agar pelaporan kinerja tidak hanya berdampak besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan, tetapi juga mendorong seluruh pegawai untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyajian informasi dalam laporan kinerja, berikut adalah beberapa langkah yang akan dilaksanakan Dinas Kesehatan : 1. Menetapkan format laporan kinerja 2. Membuat pelatihan/sosialisasi peningkatan kualitas data yang dapat meningkatkan penyajian informasi laporan kinerja

No.	Komponen	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
			Konsistensi dalam proses pelaporan berjenjang dari puskesmas dan monev berkala.
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang disampaikan, guna meningkatkan akuntabilitas kinerja internal.	hasil evaluasi AKIP akan ditindaklanjuti

Sumber : Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja.

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Predikat Capaian Kinerja

No	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	< 100%	Tidak Tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	= 100%	Tercapai / Sesuai Target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan
3	>100%	Melebihi Target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (indikator kinerja yang sifatnya negatif), digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 yang dituangkan dalam Laporan kinerja tahunan ini merupakan hasil kinerja berdasarkan indikator dan target dari sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dan realisasi yang dicapai sepanjang tahun tersebut. Penyajian ini dilakukan dengan mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (periode terbaru), sehingga capaian kinerja tahun 2025 dapat dilihat secara komprehensif dalam konteks kedua periode perencanaan. Adapun pencapaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/7} \times 100$	8
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	75,94	76,24	100,40	Melebihi Target
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,60	81,66	100,07	Melebihi Target

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

Berdasarkan tabel diatas, kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 100,23% pada tahun 2025. Dengan demikian maka secara umum Dinas Kesehatan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang kesehatan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Predikat
1	2	3	4	5	6	$\frac{7}{6/7*100}$	8
1.	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,94	76,24	100,40	Melebihi Target
1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	5	6	80	Tidak Tercapai
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	23,06	24,80*	92,45	Tidak Tercapai
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	84,98	80,72	94,99	Tidak Tercapai
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,5	98,92	99,42	Tidak Tercapai
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,60	81,66	100,07	Melebihi Target

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

Catatan : (*) Menggunakan data realisasi tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, ada 2 (dua) Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang sudah mencapai target yaitu Usia Harapan Hidup dan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan. Indikator Usia Harapan dengan capaian 100,40% menggambarkan keberhasilan program pembangunan kesehatan secara umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Balikpapan, dan untuk indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dengan capaian 100.07% menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja internal instansi telah berjalan dengan baik dan terus mengalami perbaikan.

Namun, masih terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Jumlah Kematian Ibu dengan capaian 80%, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) dengan capaian 92,45%, Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) dengan capaian 94,99%, dan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan capaian 99,42%. Untuk indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) masih menggunakan data capaian tahun sebelumnya karena Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dilaksanakan setiap dua tahun sekali dan di tahun 2025 tidak dilakukan survei.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun Terakhir

Pengukuran capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 juga dilakukan dengan membandingkan realisasi dan capaian indikator kinerja terhadap tahun-tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Adapun pengukuran realisasi dan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat terlihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 6 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	74,61	-	74,78	100,38	74,89	100,50	75,87	101,78	76,24	100,40
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	85,17	-	85,47	100,22	81,37	95,29	81,45	95,26	81,66	100,07

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatkan Angka Harapan Hidup**
Indikator : Angka Harapan Hidup
Realisasi Indikator Angka Harapan Hidup di tahun 2025 yaitu 76,24 dengan capaian 100,40%, sedangkan di tahun 2024 sebesar 75,87 dengan capaian 101,78%.
- Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Indikator : Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan
Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024 yaitu 81,66 dengan capaian 100,07%, sedangkan di tahun 2024 sebesar 81,45 dengan capaian 95,26%.

Dengan adanya transisi dokumen perencanaan dari Renstra 2021–2026 menuju Renstra 2025–2029, maka pengukuran kinerja tahun 2025 juga dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029. Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 baru mulai berlaku pada tahun 2025, maka tahun tersebut menjadi *baseline* bagi seluruh indikator yang terdapat dalam dokumen perencanaan terbaru. Berikut ini adalah Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Tabel 3. 7 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,61	-	74,78	-	74,89	-	75,87	-	76,24	100,40
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	10	-	4	-	6	-	9	-	6	80
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	17,6	-	19,6	-	21,6	-	24,80	-	24,80*	92,45
		Angka keberhasilan pengobatan	89,3	-	81,9	-	81	-	84,00	-	80,72	94,99

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		2022		2023		2024		2025	
			Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		tuberkulosis (treatment success rate)										
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	97,07	-	99,11	-	99,07	-	104	-	98,92	99,42
1. 2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	85,17	-	85,47	-	81,37	-	81,45	-	81,66	100,07

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

Catatan : (*) Menggunakan data realisasi tahun sebelumnya

Tabel diatas menyajikan capaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan periode 2021–2025. Perlu diketahui bahwa data capaian persentase untuk tahun 2021-2024 tidak tersedia karena indikator-indikator tersebut belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada sasaran strategis peningkatan derajat kesehatan masyarakat, indikator Usia Harapan Hidup (UHH) menunjukkan tren meningkat dan pada tahun 2025 mencapai 76,24 tahun atau melampaui target (100,40%). Pada sasaran peningkatan akses dan mutu kesehatan, realisasi tahun 2025 untuk indikator angka kematian ibu (6 kasus), prevalensi stunting (24,80%), dan angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (80,72%) masih belum mencapai target, sementara cakupan JKN (98,92%) mendekati target namun fluktuatif. Adapun pada sasaran peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, nilai SAKIP tahun 2025 terealisasi sebesar 81,66 atau

melampaui target (100,07%). Capaian ini menjadi bahan evaluasi untuk mempertahankan keberhasilan serta meningkatkan kinerja pada indikator yang masih belum optimal.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai tahun 2025 dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	74,56	76,24	102,25%	74,58	102,22%
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	-	81,66	-	-	-

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2025)

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun keempat Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dari 2 (dua) indikator kinerja, yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah indikator kinerja Angka Harapan Hidup, sedangkan indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tidak dapat dibandingkan dengan target renstra karena indikator kinerja tersebut belum

menjadi indikator kinerja utama pada renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan serta menilai progres terhadap target jangka menengah yang ditetapkan untuk periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, tabel di bawah ini memaparkan realisasi kinerja enam indikator utama dibandingkan dengan target Renstra 2025 dan target akhir Renstra 2029.

Tabel 3. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2025-2029

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,94	76,24	100,40	76,7	99,40
1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	5	6	80	4	50
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	23,06	24,80*	92,45	17,25	117,68
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment)	%	84,98	80,72	94,99	87,98	91,73

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2029	Capaian Terhadap Akhir Renstra
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	$7=6/5*100$	8	$9=6/8*100$
		success rate)						
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,5	98,92	99,41	99,5	99,42
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,45	81,66	100,26	82,12	99,44

Sumber : Data diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2026

Catatan : (*) menggunakan data tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel 3.9 diatas dari enam indikator kinerja yang Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025, terdapat 2 (dua) indikator telah melampaui target Renstra 2025 yaitu Usia Harapan Hidup yang telah mencapai 76,24 tahun, melampaui target 2025 sebesar 100,40% dan telah mencapai 99,40% dari target akhir 2029 (76,7 tahun). Demikian pula untuk Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan mencapai 81,66 (100,26% dari target 2025), menunjukkan kinerja tata kelola yang baik. Namun masih terdapat 4 (empat) indikator yang belum mencapai target Renstra yaitu Jumlah Kematian Ibu yaitu 6 jiwa (80% dari target 2025) dengan capaian hanya 80%, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) yaitu 24,80% (92,45% dari target 2025), Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) juga masih di bawah

target, yaitu 80,70% (94,96% dari target 2025), dan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) mencapai 98,92% (99,42% dari target 2025).

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/ Standar Nasional/ Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Sebagai bagian dari evaluasi berbasis standar untuk menilai posisi capaian kinerja perangkat daerah pada tahun 2025 melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolok ukur, baik pada tingkat pelayanan minimal (SPM), tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, maupun internasional yang relevan, tabel berikut menampilkan perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 terhadap SPM/ standar nasional/ internasional. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja perangkat daerah berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional dan internasional. Perbandingan ini penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta sejauh mana kinerja perangkat daerah berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik yang berlaku secara nasional dan internasional, serta merumuskan langkah perbaikan menuju pencapaian standar layanan kesehatan yang optimal. Adapun realisasi kinerja Dinkes tahun 2025 apabila dibandingkan dengan SPM/ standar nasional/ internasional sebagai berikut:

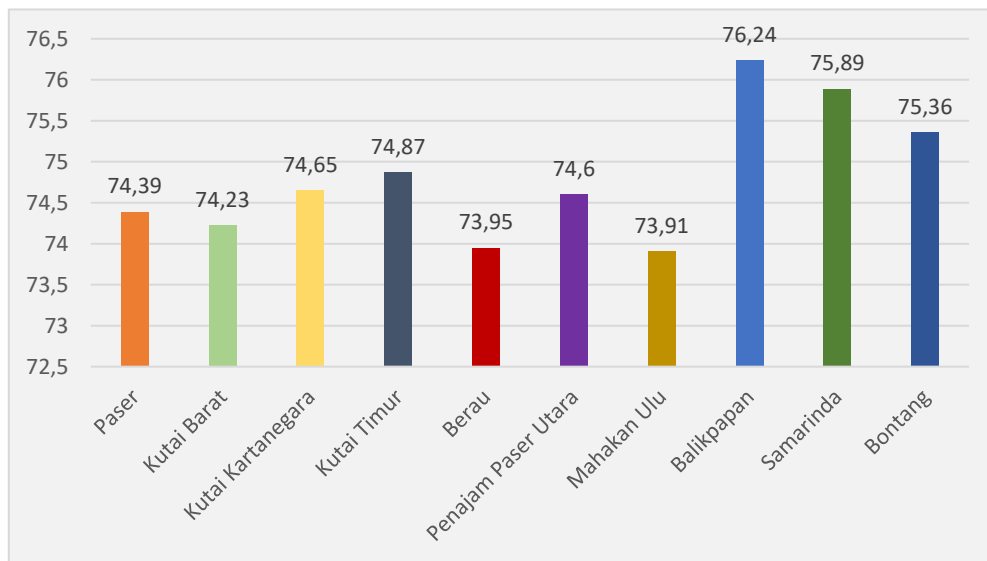
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	76,24	74,47
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,66	-

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2026)

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk indikator kinerja Angka Harapan Hidup sudah melebihi target Realisasi Nasional, untuk Indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional karena perhitungannya berbeda.

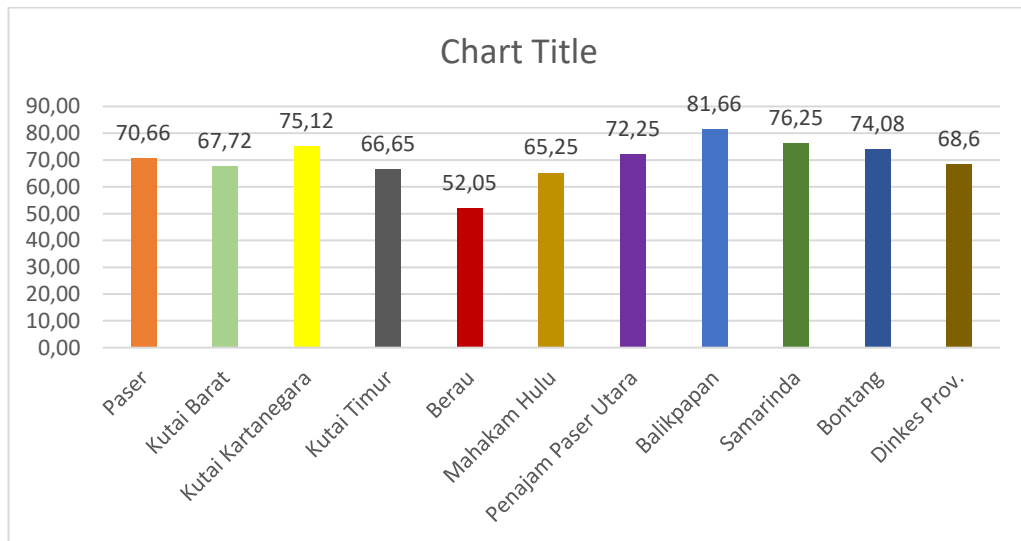
Angka Harapan Hidup di Kota Balikpapan pada tahun 2025 masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kab/Kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun perbandingan Angka Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3. 1 Angka Harapan Hidup Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur

Untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun 2025 juga masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan 9 (sembilan) Kab/Kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun perbandingan Nilai SAKIP Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 3. 2 Nilai SAKIP Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Timur

Sumber : Dinas Kesehatan Kab/Kota se Provinsi Kalimantan Timur

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai *baseline* pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,24	74,47

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	6	-
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	24,80*	-
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	80,72	84,7
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	98,92	99,10
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,66	-

Berdasarkan tabel diatas, realisasi kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk indikator kinerja Usia Harapan Hidup sudah melebihi target Realisasi Nasional, sedangkan untuk Indikator Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek), Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate), dan Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) masih lebih rendah dari target Nasional. Sedangkan untuk indikator Jumlah Kematian Ibu dan Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan terget nasional karena perhitungannya berbeda.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis disusun dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai dasar pengukuran kinerja pada masa transisi perencanaan. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 12 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	75,94	76,24	100,40	- Akses ke Layanan Kesehatan: Ketersediaan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang merata dan terjangkau - Kualitas Pelayanan: Tenaga kesehatan yang kompeten, ketersediaan obat, dan peralatan medis yang memadai - tercapainya Universal Health Coverage (UHC) melalui cakupan kepesertaan JKN	- Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan jantung serta penyakit menular seperti yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup - Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS, gangguan jiwa, dan kusta, yang	- Deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terintegrasi dengan kegiatan lintas sektor dan lintas program; - Penguatan kapasitas puskesmas, monitoring layanan kesehatan secara berkala, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dan peran keluarga perlu	- Memperluas cakupan dan kualitas Posbindu PTM, serta memperkuat jejaring rujukan untuk komplikasi PTM. - Melakukan pelatihan petugas dalam pencatatan dan pelaporan kematian, serta melakukan validasi data secara berkala dengan Dukcapil

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Program Kesehatan Masyarakat: Imunisasi, posyandu, skrining penyakit, dan program promotif-preventif yang efektif.	menyebabkan penderita enggan terbuka dan mengakses layanan kesehatan. - Masih adanya permasalahan lingkungan seperti polusi udara dan sanitasi yang kurang layak di beberapa pemukiman padat - Perubahan gaya hidup masyarakat modern yang cenderung kurang aktif dan konsumsi makanan tidak sehat	dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan penyakit tertentu (HIV/AIDS, gangguan jiwa, kusta) sesuai standar di Kota Balikpapan - Menggiatkan program STBM untuk meningkatkan akses sanitasi layak. - Meningkatkan promosi & edukasi secara optimal melalui	- Mendorong kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (misal: kawasan tanpa rokok, penyediaan ruang terbuka hijau) melalui forum-forum koordinasi lintas sektor. - Mengintegrasikan data kematian antar sektor (Dukcapil, Dinas Kesehatan) untuk akurasi perhitungan UHH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									media KIE dan/atau penyuluhan di faskes dan saat skrining - Inovasi kesehatan di setiap siklus kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Inovasi kesehatan juga dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,60	81,66	100,07	- Konsistensi dalam pemantauan dan evaluasi program secara berkala - Pelaporan kinerja yang tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik - Komitmen pimpinan dan tim dalam penerapan sistem akuntabilitas.	Belum optimalnya evaluasi kinerja di setiap bidang	- Penyusunan dokumen SAKIP lebih sistematis - Monitoring dan evaluasi berkala	- Penguatan kapasitas SDM dalam penyusunan SAKIP - Pemanfaatan aplikasi e-kinerja secara maksimal

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2026)

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 13 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atau Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
1	Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,94	76,24	100,40	- Akses ke Layanan Kesehatan: Ketersediaan fasilitas kesehatan (puskesmas, rumah sakit, klinik) yang merata dan terjangkau - Kualitas Pelayanan: Tenaga kesehatan yang kompeten, ketersediaan obat, dan peralatan	- Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan jantung serta penyakit menular seperti yang dapat mempengaruhi angka harapan hidup - Adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap penderita HIV/AIDS, gangguan jiwa, dan kusta, yang	- Deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terintegrasi dengan kegiatan lintas sektor dan lintas program; - Penguatan kapasitas puskesmas, monitoring layanan kesehatan secara berkala, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor dan peran keluarga perlu	- Memperluas cakupan dan kualitas Posbindu PTM, serta memperkuat jejaring rujukan untuk komplikasi PTM. - Melakukan pelatihan petugas dalam pencatatan dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							medis yang memadai - tercapainya Universal Health Coverage (UHC) melalui cakupan kepesertaan JKN - Program Kesehatan Masyarakat: Imunisasi, posyandu, skrining penyakit, dan program promotif-preventif yang efektif.	menyebabkan penderita enggan terbuka dan mengakses layanan kesehatan. - Masih adanya permasalahan lingkungan seperti polusi udara dan sanitasi yang kurang layak di beberapa pemukiman padat - Perubahan gaya hidup masyarakat modern yang cenderung kurang aktif dan konsumsi makanan tidak sehat	dilakukan untuk menjamin keberlanjutan pelayanan kesehatan penyakit tertentu (HIV/AIDS, gangguan jiwa, kusta) sesuai standar di Kota Balikpapan - Menggiatkan program STBM untuk meningkatkan akses sanitasi layak. - Meningkatkan promosi & edukasi secara optimal melalui media KIE dan/atau penyuluhan di faskes dan saat skrining - Inovasi kesehatan di setiap siklus kehidupan	pelaporan kematian, serta melakukan validasi data secara berkala dengan Dukcapil - Mendorong kebijakan publik yang berwawasan kesehatan (misal: kawasan tanpa rokok, penyediaan ruang terbuka hijau) melalui forum-forum koordinasi lintas sektor.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
									manusia, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Inovasi kesehatan juga dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	- Mengintegrasikan data kematian antar sektor (Dukcapil, Dinas Kesehatan) untuk akurasi perhitungan UHH
1.1	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	5	6	80	- Menjalankan Strategi pelaksanaan supervisi fasilitatif ke Puskesmas dan evaluasi pelayanan program di jejaring - Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal Surveilans Respon sebagai pembelajaran dan	- Longgarnya administrasi kependudukan mengakibatkan penduduk pendatang kurang terkontrol dan kurang terpantau oleh kader dan nakes sehingga terjadi keterlambatan dalam penemuan kasus - Mudahnya akses pelayanan kesehatan	- Melaksanakan analisis permasalahan yang menjadi penyebab utama kematian ibu - Penguatan skrining risiko tinggi dengan melibatkan ibu hamil dan keluarga serta peran serta kader dan masyarakat namun masih harus terus dimonitoring	- Pembenahan sistem kesehatan terintegrasi, tidak terkotak kotak - kolaborasi lintas program dan lintas bidang kesehatan maupun OPD terkait dalam upaya meningkatkan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							tindak lanjut permasalahan yang menjadi penyebab kematian.	sehingga masyarakat memiliki banyak pilihan faskes untuk mendapatkan pelayanan kesehatannya, namun demikian tidak semua faskes memberikan pelayanan sesuai standar - Rendahnya sense of crisis dari pemberi layanan kesehatan	- Kualitas pelayanan di seluruh faskes baik pemerintah maupun swasta belum memenuhi standar.	pelayanan sesuai standar yang ditetapkan - peran aktif seluruh bidang, sektor dan masyarakat di semua lini.
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	23,06	24,80	92,45	Ketersediaan layanan deteksi dini balita bermasalah melalui pemantauan pertumbuhan dan perkembangan di Posyandu rutin	Penanganan balita stunting dengan terapi medis melalui tatalaksana PKMK mengalami kendala bagi balita stunting yang terindikasi laktose intoleran dan keluarga kurang kooperatif	Melakukan pencegahan terhadap insiden kasus stunting baru dengan pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi balita gizi kurang, balita underweight, balita	Pencegahan dan penanganan stunting dilakukan dengan deteksi dini balita sejak 1000 hari pertama kehidupan di posyandu maupun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							dilakukan sebulan sekali	terhadap pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi balita bermasalah gizi di Faskes	tidak naik berat badan dan PMT bagi ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK). Bagi yang terdiagnosa stunting oleh dokter spesialis anak selanjutnya diberikan terapi gizi medis menggunakan tatalaksana PKMK.	fasilitas kesehatan terdekat
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	84,98	80,72	94,99	- Adanya peraturan daerah/perwal terkait penanggulangan TB mewajibkan warga yang terkena TB berobat sampai selesai - Adanya kerjasama lintas sektor (kelurahan, perusahaan, dll)	- Mobiliasi penduduk tinggi, banyak pasien pekerja dari luar Balikpapan dan saat pulang kampung tidak menginformasikan kepada ke Petugas Faskes, pasien pekerja takut diberhentikan oleh perusahaan jika TB	- Melakukan KIE secara intensif dan penyuluhan terkait TBC khususnya terkait dampak jika pasien tidak menyelesaikan pengobatan TB - Berkoordinasi dengan perusahaan untuk ikut serta dalam penanggulangan TB	Penerapan peraturan menteri tenaga kerja tentang penganggulangan TB di tempat kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							dalam pemantauan pengobatan pasien TB	- Pengobatan yang lama dan efek samping membuat pasien TB tidak mau melanjutkan sampai selesai	dan mendukung karyawannya minum obat sampai selesai	
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,5	98,92	99,42	- sinergi kebijakan dan komitmen berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung implementasi program BPJS Kesehatan melalui pengalokasian anggaran untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)	- Dinamika perubahan data penduduk miskin dan rentan. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, perpindahan domisili, kematian, serta perubahan status pekerjaan, menyebabkan adanya penyesuaian data peserta PBI APBD yang berdampak pada	- Percepatan pemutakhiran data kepesertaan. Melakukan verifikasi dan validasi data peserta PBI APBD secara lebih intensif dan terjadwal, terutama bagi peserta dengan potensi perubahan status sosial ekonomi, kependudukan, atau domisili. - Peningkatan kualitas data kependudukan.	- Percepatan verifikasi dan validasi kepesertaan PBI APBD. Melaksanakan verifikasi dan validasi data peserta secara lebih intensif dan terjadwal, terutama bagi peserta dengan status kepesertaan tidak aktif atau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							daerah khususnya warga Kota Balikpapan, sehingga kelompok masyarakat kurang mampu tetap memperoleh perlindungan jaminan kesehatan - dukungan regulasi dan integrasi kepesertaan JKN dalam berbagai layanan administrasi publik turut mempercepat perluasan cakupan - sosialisasi yang berkelanjutan dan terus ditingkatkan secara terpadu di	fluktuasi jumlah kepesertaan aktif - Keterlambatan pembaruan data usulan dari masyarakat. Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian dan pemutakhiran data usulan calon peserta PBI APBD dari tingkat kelurahan atau Puskesmas, sehingga tidak seluruh calon peserta dapat langsung terakomodasi dalam periode penilaian kinerja - Status kepesertaan nonaktif sementara. Sebagian kecil peserta mengalami status nonaktif sementara	Memperkuat sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan kesesuaian data NIK, status kependudukan, dan identitas peserta guna meminimalkan kepesertaan nonaktif akibat kendala administratif - Pengendalian kepesertaan nonaktif sementara. Menyusun mekanisme monitoring status kepesertaan secara berkala bersama BPJS Kesehatan, sehingga peserta yang	berpotensi berubah, guna memastikan kepesertaan aktif tepat waktu - Optimalisasi koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Memperkuat koordinasi teknis dengan BPJS Kesehatan dalam rangka pemantauan status kepesertaan, pengendalian pembayaran iuran, serta percepatan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							tingkat Pemerintah Kota Balikpapan dan OPD Teknis terkait serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan kesehatan yang berkesinambungan - Dari sisi struktur ekonomi, karakteristik kota Balikpapan sebagai kota industri dan jasa dengan proporsi pekerja sektor formal yang cukup besar turut berkontribusi pada	akibat kendala administratif, seperti ketidaksesuaian data kependudukan (NIK), yang memerlukan waktu untuk proses perbaikan dan reaktivasi.	berpotensi nonaktif dapat segera diidentifikasi dan dilakukan reaktivasi tepat waktu.	reaktivasi peserta nonaktif - Penertiban dan perbaikan data kependudukan. Bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memastikan kesesuaian data NIK dan status kependudukan peserta PBI APBD guna meminimalkan kendala administratif - Penguatan peran Puskesmas dan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							tingginya angka kepesertaan, karena pekerja formal secara otomatis terdaftar dalam sistem JKN oleh Badan Usaha pemberi kerja - Ketersediaan akses fasilitas kesehatan yang semakin memadai mulai fasilitas kesehatan di tingkat pelayanan kesehatan primer sampai kepada fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.			aparat kelurahan. Meningkatkan kapasitas SDM Puskesmas dan kelurahan melalui bimbingan teknis terkait pendataan, verifikasi, serta mekanisme usulan peserta PBI APBD agar proses berjalan lebih cepat dan akurat - Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Melakukan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
										sosialisasi berkelanjutan terkait hak dan kewajiban peserta PBI APBD, termasuk pentingnya pembaruan data, agar masyarakat lebih proaktif dalam menjaga keaktifan kepesertaan JKN.
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,60	81,66	100,07	- Konsistensi dalam pemantauan dan evaluasi program secara berkala - Pelaporan kinerja yang tepat waktu	Belum optimalnya evaluasi kinerja di setiap bidang	- Penyusunan dokumen SAKIP lebih sistematis - Monitoring dan evaluasi berkala	- Penguatan kapasitas SDM dalam penyusunan SAKIP

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan	Penyebab Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
							dan terdokumentasi dengan baik - Komitmen pimpinan dan tim dalam penerapan sistem akuntabilitas.			- Pemanfaatan aplikasi e-kinerja secara maksimal

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan /Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Adapun Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025 tergambar pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 14 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	100,40					
1.1	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	100,40	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	80,00	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	87,69	104,39
					Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	92,45	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan	100	100	100,00
								Presentase Saprasi memenuhi Standar Kesehatan			#DIV/0!

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	94,99	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Unit)	2	0	0,00
					Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99,42	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	1	100,00
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	4	4	100,00
							Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	7	7	100,00
							Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	286	241	84,27

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	4	4	100,00
							Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1550	1603	103,42
							Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	4	4	100,00
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	100	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.935	11.935	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.882	11.882	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.386	11.661	102,42
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	46.443	48.320	104,04
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	111.002	111.839	100,75
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	329.665	329.669	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	41.550	41.988	101,05
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	66.932	66.934	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	18.432	19.342	104,94
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	798	823	103,13
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	19.762	21.626	109,43

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	20.368	22.217	109,08
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	1	1	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	1	0	0,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	1	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	1	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	1	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1	1	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	1	1	100,00
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	1	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5000	3407	68,14

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	40	62	155,00
							Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	1	1	100,00
							Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	3	3	100,00
							Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	1	100,00
							Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	12	12	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	1	1	100,00
							Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2	2	100,00
							Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	27	27	100,00
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3	3	100,00
							Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di kabupaten/ kota	28	28	100,00
							Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	1	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1200	1200	100,00
							Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	180	320	177,78
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang yang mendapat pelayanan kesehatan malaria	350	350	100,00
							Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah Tatanan Kawasan Tanpa Rokok yang Tidak Ditemukan Aktifitas Merokok	5	5	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	27	27	100,00
							Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1	1	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	27	27	100,00
							Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1	1	100,00
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	1	100,00
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	61,54	97,67	158,71
							Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	1	100,00
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	100	100	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya (Unit)	15	15	100,00
							Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	28	28	100,00
							Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	28	28	100,00
							Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	1	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	88	100	113,64
							Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang diterbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan / jumlah rekomendasi yang diusulkan)	88	100	113,64
							Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	100,00
							Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perijinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1	1	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMK yang kuantitasnya sesuai dengan standar)	85	85	100,00
							Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100,00
							Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	10	10	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	1	100,00
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM yang berkualitas (Jumlah SDM yang berkualitas/ Jumlah SDM Keseluruhan)	78	100	128,21
							Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	300	371	123,67
							PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum yang Diterbitkan	100	100	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan	100	100	100,00
							Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1	1	100,00
							Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan	90	100	111,11

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	1	100,00
							Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK	100	100	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	1	100,00
							Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan	90	100	111,11

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	1	100,00
							Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan	100	100	100,00
							Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1	1	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa	90	100	111,11
							Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100	100	100,00
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	88	65,96	74,95

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %	84	88,23	105,04
							Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	1	100,00
							Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS	100	100	100,00
							Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1	1	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	100	100	100,00
							Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	1	100,00
1.2	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	100,07	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	100,07	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84,1	78,06	92,82
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN	81,45	81,66	100,26
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	100,00
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	87,13	79,38	91,11

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1310	1343	102,52
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,05	81,58	97,06
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	2	100,00
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	100,00
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	2	100,00
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	100,00
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	5	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3	3	100,00
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	100,00
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	100,00
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	100,00
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81,63	70,72	86,63
							Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6	6	100,00
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	5	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan	131	131	100,00
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	92	92	100,00
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	24	24	100,00
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86,69	78,42	90,46
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	100,00
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	4	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82,18	77,88	94,77
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	6	100,00
							Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	294	294	100,00
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	10	100,00
							Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	2	100,00

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	310	310	100,00
							Peningkatan Pelayanan BLUD		100	100	100,00
							Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	30	30	100,00

Sumber : Sub Bagian Program Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

Tabel 3.14 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Apabila mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 (Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026), pada tahun 2025 sasaran

strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan semuanya telah mencapai target, yaitu sasaran strategis Meningkatnya Angka Harapan Hidup dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup pada Tahun 2025 yang mengacu pada tercapai sebesar 100,40% dan sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tercapai sebesar 100,07%, sementara sasaran strategis yang mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029, sasaran strategis yang telah tercapai yaitu Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai AKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sebesar 100,07%, melalui pelaksanaan :

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Angka Harapan Hidup dengan indikator kinerja Angka Harapan Hidup tercapai sebesar 101,78% melalui program:
 - a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan melalui beberapa kegiatan seperti :
 - Pembangunan RSUD Sayang Ibu dan RS Balikpapan Timur;
 - Pembangunan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - Penyediaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas;
 - Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan;
 - Melaksanakan Audit Maternal Perinatal sebagai upaya menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi;
 - Menyelenggarakan upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia;

- Menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada seluruh masyarakat secara merata dan adil dimana SPM menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan kesehatan;
- Deteksi dini penyakit menular dan penyakit tidak menular yang terintegrasi dengan kegiatan lintas sektor dan lintas program;
- Melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah Dengan Manfaat Pelayanan Kelas III sebagai upaya memastikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan menciptakan sistem jaminan kesehatan yang lebih berkelanjutan dan inklusif;
- Melaksanakan program eliminasi ATM (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang merupakan bagian dari target Sustainable Development Goals (SDGs) dan juga menjadi komitmen global;
- Pemeliharaan dan Pemutakhiran aplikasi yang menunjang pelayanan kesehatan seperti penggunaan Rekam Medis Elektronik di Puskesmas se-Kota Balikpapan, SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat), Aplikasi FKPK (Formulir Keterangan Penyebab Kematian) , dan lain-lain;
- Inovasi kesehatan di setiap siklus kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Inovasi kesehatan juga dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Inovasi kesehatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait;

- Melaksanakan pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui kegiatan:
- Pemutakhiran data rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - Pemutakhiran data SISDMK;
 - Bimbingan Tekhnis peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 - Sosialisasi Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan pada Organisasi Profesi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman melalui kegiatan:
- Pemeriksaan sampel makanan secara berkala bekerjasama dengan BPOM;
 - Sosialisasi perizinan Apotik dan Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
 - Monitoring dan Evaluasi Perizinan Apotik dan Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal;
 - Bimbingan Tekhnis Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
 - Uji makanan dan minuman berbahaya.
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan melalui kegiatan:
- Kegiatan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat (GERMAS) yang dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan lintas program

dan lintas sektor seperti Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain;

- Hibah kepada Yayasan Jantung Indonesia, Palang Merah Indonesia, dan Yayasan Kanker Indonesia.
- Pemberdayaan kader kesehatan yang diintegrasikan ke dalam seluruh kegiatan Puskesmas

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tercapai sebesar 100,07%, melalui program dan kegiatan penguatan kapasitas internal dalam penerapan SAKIP. Hal ini juga didukung oleh kegiatan penyusunan perencanaan yang lebih terintegrasi antara Renstra dan Renja, komitmen seluruh jajaran dalam melaksanakan kegiatan perencanaan berbasis kinerja, pengukuran capaian IKU yang konsisten, dan penyusunan pelaporan akuntabilitas yang tepat waktu dan berkualitas, serta Pemanfaatan teknologi informasi untuk memudahkan pemantauan kinerja.

Pencapaian tersebut juga didukung oleh beberapa faktor yaitu :

a. Upaya Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk meningkatkan angka harapan hidup diantaranya melakukan inovasi kesehatan di setiap siklus kehidupan manusia, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut. Inovasi kesehatan juga dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Inovasi kesehatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait. Inovasi kesehatan di lingkungan Dinas kesehatan Kota Balikpapan diantaranya adalah:

- Inovasi GEMPUR STUNTING (Gerakan Bersama Posyandu Berantas Stunting)
GEMPUR STUNTING (Gerakan Bersama Posyandu Berantas Stunting) adalah program gerakan bersama berbasis komunitas yang melibatkan posyandu, tenaga kesehatan, masyarakat dan

pemerintah dalam pencegahan stunting dengan meningkatkan kesadaran serta partisipasi orang tua dalam pemantauan pertumbuhan anak melalui gerakan 100% balita ditimbang, penunjukan RT sebagai orang tua asuh balita dan kelas ibu pintar yang melibatkan organisasi profesi, akademisi serta berbagai pemangku kepentingan untuk pemberian edukasi dan pelatihan guna memastikan setiap balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan optimal demi generasi sehat cerdas dan bebas stunting.



Gambar 3. 1 Inovasi GEMPUR STUNTING
Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

- Inovasi SAYUNARA (Sayangi Ibu Hamil dengan Persalinan Paripurna)

SAYUNARA adalah salah satu program inovasi Puskesmas Mekar Sari Kota Balikpapan dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (Klaster 2 ILP) dengan memberikan pelayanan persalinan secara Paripurna untuk memudahkan Ibu Hamil dalam menghadapi persalinan, mulai dari pendampingan selama kehamilan sampai pada proses persalinan serta pelayanan post persalinan secara komprehensif. Pelayanan Sayunara melibatkan seluruh aspek dan membutuhkan peran serta Lintas Sektor yang ada di wilayah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jejaring Klinik dan dokter praktek Mandiri dan seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya pelayanan Inovasi ini, diharapkan dapat mendukung program pemerintah menuju Zero AKI dan AKB



Gambar 3. 2 Inovasi SAYUNARA
Sumber : UPTD Puskesmas Mekar Sari

- Inovasi TELETABIS (Teknologi Temukan dan Eliminasi Tuberkulosis) memiliki tujuan umum yaitu meningkatkan kualitas aksesibilitas layanan pemeriksaan Tuberkulosis (TBC) di Laboratorium Puskesmas Karang Joang untuk mendukung upaya pengendalian dan pencegahan TBC di Karang Joang.



Gambar 3. 3 Inovasi TELETABIS

Sumber : UPTD Puskesmas Karang Joang

- Penyusunan Raperda SKD
- Komitmen bersama dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu layanan kesehatan pada seluruh lini fasilitas pelayanan kesehatan;
- Kebijakan dan pendanaan dari pemerintah kota dalam hal pengawasan kualitas layanan publik ;
- Komitmen yang tinggi dari segenap jajaran untuk memberikan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat ;
- Dukungan yang tinggi dari pihak pemerintah baik pemerintah kota, provinsi dan pusat;
- Dukungan dari masyarakat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dalam pelayanan kesehatan untuk masyarakat;

- h. Beberapa elemen pendukung telah berbasis sistem online sehingga sangat signifikan mempunyai daya ungkit dalam menunjang pelayanan kepada publik.

Sedangkan sasaran strategis yang belum mencapai target yang mengacu pada Renstra Tahun 2025-2029 yaitu sasaran strategis Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat dengan indikator kinerja Jumlah Kematian Ibu tercapai sebesar 80%, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) tercapai sebesar 24,80%, Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) tercapai sebesar 94,99%, dan indikator kinerja Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) tercapai sebesar 99,42%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan program dan intervensi yang masih perlu ditingkatkan efektivitas dan jangkauannya. Hal ini mencakup optimalisasi sistem surveilans kesehatan ibu dan anak, penguatan komitmen lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting, peningkatan kepatuhan pasien TB berobat tuntas, serta perluasan cakupan kepesertaan JKN bagi seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok informal dan rentan

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Adapun analisis atas penggunaan sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Pada subbab ini disajikan analisis atas efisiensi penggunaan

sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 dengan mengkaji kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan aparatur, pola penugasan, serta kontribusinya terhadap pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berjumlah 1090 orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung oleh 923 orang ASN/PNS. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN/PNS pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menurut jabatan dan jenis kelamin.

Tabel 3. 15 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menurut jabatan dan Jenis Kelamin

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
1.	Kepala Dinas	0	1
2.	Kepala Bidang	0	3
3.	Kepala Sub Bagian	0	2
4.	Administrator Kesehatan	7	15
5.	Nutrisisionis	4	27
6.	Sanitarian	2	19
7.	Epidemiologi	1	3
8.	Entomologi	0	1
9.	Dokter	11	63
10	Dokter Gigi	2	33
11	Analisis Kebijakan	0	1
12	Analisis Kepegawaian	0	1
13	Apoteker	3	34

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin	
		Laki-laki (L)	Perempuan (P)
14	Asisten Apoteker	6	24
15	Perawat	36	104
16	TGM	4	21
17	Bidan	0	151
18	Penyuluh Kesehatan	4	28
19	Kepala UPTD	0	3
20	Ka TU	5	18
21	ATLM	7	39
22	Rekam Medis	0	11
23	Fisioterapi	0	5
24	Administrasi	64	160
Jumlah		156	767

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

Selain ditinjau dari jabatan, kondisi sumber daya manusia juga dianalisis berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi. Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 16 Komposisi/Perbandingan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kesehatan Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Kebutuhan	Bezzeting/Keadaan
1.	S2	20	18
2.	S1	333	297
3.	D3	549	491
4.	SMA	188	112
5.	SMP	0	4
6.	SD	0	1

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

Dari gambaran tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan di dominasi oleh kualifikasi pendidikan D3 berjumlah 491 orang, kemudian diikuti oleh pendidikan S1 berjumlah 297 orang, pendidikan SMA berjumlah 112 orang, S2 berjumlah 18 orang, SMP berjumlah 4 orang, dan SD 1 orang. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada dan mengusulkan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, serta pengangkatan Tenaga Kontrak.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan pembagian tugas lintas bidang/kerja tim, penugasan rangkap, pemanfaatan sistem digital, penambahan beban tugas terhadap personil yang ada dan pengusulan tambahan pegawai ke BKPSDM Kota Balikpapan, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

2. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana

Tabel 3.17 ini menyajikan data inventarisasi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan guna mendukung analisis efisiensi penggunaannya. Data yang menggambarkan jenis, jumlah, kondisi, serta tingkat pemanfaatan ini tidak hanya mendeskripsikan kepemilikan aset, tetapi terutama dimaksudkan sebagai dasar dalam menilai

kesesuaian antara ketersediaan sarana dan prasarana dengan kebutuhan organisasi.

Tabel 3. 17 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1.	Bangunan Klinik/Puskesmas	47	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
2.	Bangunan Rumah Sakit Khusus	1	Baik	(√)		
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Baik	(√)		
4.	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	1	Baik	(√)		
5.	Bangunan Klinik/Puskesmas	12	Rusak Ringan		(√)	
6.	Bangunan Klinik/Puskesmas	3	Rusak Berat		(√)	dihapus dan dibangun Kembali (Karang rejo, Gn bahagia, Karang jati Lelokasi)
7.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	Rusak Berat		(√)	Puskesmas Muara rapak (Dalam Proses Perbaikan)
8.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	36	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
9.	Mobil Ambulance	43	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
10.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	6	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
11.	Pick Up	3	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
12.	Mobil Jenazah	3	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
13.	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	2	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
14.	Mobil Unit Visual Mini (MUVIANI)	1	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
15.	Sepeda Motor	93	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
16.	Mobil Ambulance	11	Rusak Berat		(√)	
17.	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	14	Rusak Berat		(√)	
18.	Pick Up	1	Rusak Berat		(√)	
19.	Sepeda Motor	69	Rusak Berat		(√)	
20.	P.C Unit	551	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
21.	P.C Unit	245	Rusak Berat		(√)	
22.	Lap Top	176	Baik	(√)		Digunakan untuk

No	Jenis Sarana/ Prasarana	Jumlah Unit	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
						pelayanan operasional
23.	Lap Top	24	Rusak Berat		(√)	
24.	Note Book	17	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
25.	Note Book	21	Rusak Berat		(√)	
26.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	371	Baik	(√)		Digunakan untuk pelayanan operasional
27.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	183	Rusak Berat		(√)	
	Jumlah	1938				

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2025

Berdasarkan data inventarisasi diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kota Balikpapan berada dalam kondisi yang baik dan dimanfaatkan secara aktif serta sesuai peruntukannya untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari administrasi perkantoran hingga pelaksanaan teknis di lapangan. Kondisi ini merefleksikan pencapaian optimalisasi dan efisiensi dalam pemanfaatan aset daerah.

Di sisi lain, tabel yang memuat detail aset yang digunakan dana aset yang tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Sejumlah aset yang belum termanfaatkan secara optimal, dengan faktor penyebab antara lain kondisi aset, kesesuaian dengan kebutuhan operasional saat ini, dan dinamika kebijakan organisasi. Informasi ini memberikan landasan yang objektif bagi proses evaluasi

pengelolaan aset, khususnya untuk menyusun langkah optimalisasi pemanfaatan aset daerah serta menyempurnakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di masa yang akan datang.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis atas efisiensi penggunaan anggaran ini dilakukan untuk melakukan penilaian atas tingkat efisiensi penggunaan anggaran dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja perangkat daerah selama tahun pelaporan. Analisis dilaksanakan melalui pengkajian terhadap keterkaitan antara aspek alokasi dan realisasi anggaran dengan capaian *output* dan *outcome* sebagaimana tercermin dalam indikator kinerja yang telah ditetapkan. Uraian difokuskan pada perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, untuk memberikan gambaran nyata mengenai tingkat efisiensi pemanfaatan anggaran dalam penyelenggaraan program dan kegiatan. Hasil analisis ini disajikan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyempurnakan proses perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)

PAKi: Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)

RAKi: Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 18 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)	Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatnya Angka Harapan Hidup	Angka Harapan Hidup	Umur	75,94	76,24	100,40	247.425.979.757,00	216.308.438.723,96	87,42%	12,92%	Efisien
2.	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,60	81,66	100,07	364.324.889.749,00	306.982.001.724,04	84,26%	15,80%	Efisien

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2026)

Tabel 3. 19 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,94	76,2400	100,40%	611.750.869.506,00	523.290.440.448,00	85,54%	14,80%	Efisien
	Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	5,00	6,00	120,00%	247.425.979.757,00	216.308.438.723,96	87,42%	27,15%	Efisien
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	23,06	24,80	107,55%				18,71%	Efisien
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	84,98	80,72	94,99%				7,96%	-

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
		Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,5	98,92	99,42%				12,06%	-
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	Nilai	81,60	81,66	100,07%	364.324.889.749,00	306.982.001.724,04	84,26%	15,80%	Efisien

Sumber: Data Diolah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan (2026)

Berdasarkan tabel diatas analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran), diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bahwa terdapat 2 indikator yang bersumber dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021–2026 yang capaian kinerjanya mencapai 100% atau lebih, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;
3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan yang bersumber dari Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun

2025-2029 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui.

Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah pembangunan periode baru;
2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja tertentu yang telah mencapai target, sementara pada indikator lainnya efisiensi belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Realisasi anggaran belanja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan pada tahun 2025 sebesar 85,56% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 20 Penyerapan Anggaran Belanja pada Tahun 2025

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
	Sasaran I : Meningkatnya Angka Harapan Hidup			
A.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	240.639.307.924,00	210.186.235.341,96	87,34%
I.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	55.768.970.482,00	46.763.482.168,00	83,85%
1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	4.218.000.000,00	931.202.584,00	22,08%
2	Pembangunan Puskesmas	13.746.700.000,00	11.008.022.401,00	80,08%
3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	4.923.050.000,00	4.339.151.686,00	88,14%
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	4.000.000.000,00	3.262.177.225,00	81,55%
5	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	13.384.452.482,00	11.933.601.953,00	89,16%
6	Pengadaan dan pemeliharaan alat kalibrasi	350.000.000,00	332.082.000,00	94,88%
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	878.582.000,00	840.665.103,00	95,68%
8	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	14.268.186.000,00	14.116.579.216,00	98,94%
II	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	183.613.084.197,00	162.571.871.109,96	88,54%
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.780.282.340,00	1.668.910.661,69	93,74%
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	219.136.200,00	217.349.000,00	99,18%
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	489.647.230,00	444.600.545,00	90,80%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	499.146.225,00	496.132.500,00	99,40%
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1.192.815.855,00	1.119.286.000,00	93,84%
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	571.974.382,00	544.104.240,00	95,13%
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	738.611.750,00	726.736.568,00	98,39%
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	143.581.800,00	115.552.160,00	80,48%
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	418.237.180,00	363.349.578,00	86,88%
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	333.014.000,00	296.224.000,00	88,95%
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	1.060.306.130,00	981.172.916,00	92,54%
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	317.022.000,00	287.640.750,00	90,73%
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	148.578.042,00	7.932.000,00	5,34%
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	149.170.000,00	0	0,00%
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	17.759.612.810,00	12.182.807.002,00	68,60%
16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	326.691.550,00	293.817.243,00	89,94%
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	628.134.630,00	428.354.570,00	68,19%
18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1.454.807.235,00	1.386.853.351,00	95,33%
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	156.675.950,00	131.257.000,00	83,78%
20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.830.269.570,00	2.353.723.910,00	83,16%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	368.521.100,00	317.762.500,00	86,23%
22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	72.378.200,00	69.940.500,00	96,63%
23	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan Dan Pasca Krisis Kesehatan	62.280.000,00	43307500	69,54%
24	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	5.184.439.290,00	4.398.908.916,00	84,85%
25	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	100.315.795.774,00	94.259.047.631,00	93,96%
26	Pengambilan Dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB Ke Laboratorium Rujukan/Nasional	34.800.000,00	9.919.000,00	28,50%
27	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	235.995.250,00	127.919.500,00	54,20%
28	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	5.831.900.000,00	4.716.175.935,00	80,87%
29	Operasional Pelayanan Puskesmas	31.603.597.158,00	27.205.652.722,00	86,08%
30	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4.734.732.056,00	3.983.745.128,00	84,14%
31	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	107.168.950,00	99.660.000,00	92,99%
32	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.799.731.070,00	1.509.758.238,00	83,89%
33	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	114.910.870,00	104.815.600,00	91,21%
34	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	182.578.200,00	108.865.250,00	59,63%
35	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	67.295.700,00	55.870.000,00	83,02%
36	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	166.850.000,00	145.996.250,00	87,50%
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	627.865.500,00	581.029.500,00	92,54%
38	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	427.336.700,00	408.022.946,27	95,48%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
39	Pengelolaan Pelayanan Kelanjut Usia	127.150.000,00	113.800.000,00	89,50%
40	Pengelolaan Layanan Imunisasi	183.398.500,00	154.757.499,00	84,38%
41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	146.645.000,00	111.112.500,00	75,77%
III	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	612.636.000,00	429.565.982,00	70,12%
2	Pengelolaan sistem informasi kesehatan	612.636.000,00	429.565.982,00	70,12%
IV	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	644.617.245,00	421.316.082,00	65,36%
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	59.590.000,00	48.477.500,00	81,35%
2	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	74.294.000,00	70.273.700,00	94,59%
3	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	111.278.720,00	93.818.706,00	84,31%
4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	399.454.525,00	208.746.176,00	52,26%
B	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.547.928.000,00	2.118.677.782,00	83,15%
I	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	217.964.000,00	175.474.700,00	80,51%
1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	68.600.000,00	56.415.000,00	82,24%
2	Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut perijinan praktik tenaga kesehatan	149.364.000,00	119.059.700,00	79,71%
II	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	200.192.000,00	146.182.244,00	73,02%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia	60.840.000,00	55.850.000,00	91,80%
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	19.966.000,00	18.810.000,00	94,21%
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	119.386.000,00	71.522.244,00	59,91%
III	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.129.772.000,00	1.797.020.838,00	84,38%
1	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM K	2.129.772.000,00	1.797.020.838,00	84,38%
C	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.335.318.278,00	1.267.721.620,00	94,94%
I	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	274.190.600,00	224.435.410,00	81,85%
1	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)	274.190.600,00	224.435.410,00	81,85%
II	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	191.245.475,00	190.126.120,00	99,41%
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	191.245.475,00	190.126.120,00	99,41%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
III	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	619.036.203,00	612.190.800,00	98,89%
1	Pengendalian dan pengawasan serta TL pengawasan sertifikat produksi PIRT dan Nomor P-IRT sbg IP utk PMMT yg dapat diproduksi oleh IRT	619.036.203,00	612.190.800,00	98,89%
IV	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.200.000,00	24.600.000,00	97,62%
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	25.200.000,00	24.600.000,00	97,62%
V	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75.000.000,00	69.505.940,00	92,67%
1	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	75.000.000,00	69.505.940,00	92,67%
VI	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	150.646.000,00	146.863.350,00	97,49%
1	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	150.646.000,00	146.863.350,00	97,49%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.903.425.555,00	2.735.803.980,00	94,23%
I	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00%
1	Peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	100,00%
II	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	335.168.225,00	289.196.000,00	86,28%
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan Hidup Bersih Dan Sehat	335.168.225,00	289.196.000,00	86,28%
III	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	468.257.330,00	346.607.980,00	74,02%
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	468.257.330,00	346.607.980,00	74,02%
	Sasaran II : Meningkatnya Angka Harapan Hidup			
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	364.324.889.749,00	306.982.001.724,04	84,26%
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	128.575.000,00	98.216.000,00	76,39%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	128.575.000,00	98.216.000,00	76,39%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	198.573.236.179,00	167.656.151.399,00	84,43%
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	198.573.236.179,00	167.656.151.399,00	84,43%
III	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.592.811.470,00	1.462.910.517,00	91,84%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000,00	10.256.400,00	68,38%
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	112.826.970,00	102.559.560,00	90,90%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.000.000,00	18.614.700,00	93,07%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	452.810.000,00	426.810.000,00	94,26%
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	288.374.500,00	204.023.750,00	70,75%
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.000.000,00	27.675.000,00	92,25%
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000,00	49.942.000,00	99,88%
8	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	599.550.000,00	599.029.107,00	99,91%
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	24.250.000,00	24.000.000,00	98,97%
IV	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.040.164.600,00	5.204.501.810,00	86,16%
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	624.000.000,00	491.100.000,00	78,70%
2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.385.000,00	145.849.999,00	73,15%
3	Pengadaan Mebel	1.300.000.000,00	1.210.636.901,00	93,13%
4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	885.000.000,00	845.950.010,00	95,59%
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.031.779.600,00	2.510.964.900,00	82,82%
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.795.150.000,00	1.504.257.973,00	83,80%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	550.150.000,00	496.499.208,00	90,25%
2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1.245.000.000,00	1.007.758.765,00	80,94%
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.773.991.500,00	4.204.056.533,00	88,06%
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	150.000.000,00	83.717.302,00	55,81%

No.	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5
2	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	2.200.000.000,00	2.083.757.820,00	94,72%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,00	137.373.600,00	68,69%
4	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.390.359.000,00	1.270.371.595,00	91,37%
5	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	833.632.500,00	628.836.216,00	75,43%
1	Peningkatan Pelayanan BLUD	151.420.961.000,00	126.851.907.492,04	83,77%
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	151.420.961.000,00	126.851.907.492,04	83,77%
	TOTAL	611.750.869.506,00	523.290.440.448,00	85,54%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

3.4 Prestasi Dinas Kesehatan Tahun 2025

Tabel 3. 21 Prestasi Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Nama Penghargaan	Dokumentasi
1.	Penghargaan Swasti Saba Wiwerda atas Keberhasilan Menyelenggarakan Kota Sehat Tahun 2025	
2.	Penghargaan UHC Award	

No	Nama Penghargaan	Dokumentasi
3.	Penghargaan Puskesmas Mekarsari sebagai Peringkat 1 Puskesmas Berprestasi pada Jambore Puskesmas Nasional II	
4.	Penghargaan Puskesmas Margomulyo sebagai Peringkat 1 Keterbukaan Informasi Publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur	

No	Nama Penghargaan	Dokumentasi
5.	Penghargaan Pelaksana Program Vaksinasi Dengue sebagai Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Dengue	
6.	Peringkat kedua Pemenang Sepekan Mengejar Imunisasi (PENARI) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur	

No	Nama Penghargaan	Dokumentasi
7.	Penghargaan Kampung KTR dari Kemenkes dan Adinkes	
8.	Juara 1 Wali Kota Award Bidang Pengawasan Kategori Anggaran diatas 100 Milliar	
9.	Terbaik ke 3 Penilaian Pengelolaan Kepegawaian	

Sumber : Dokumentasi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada bab III sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Balikpapan untuk Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- I. Sasaran Strategis Meningkatnya Angka Harapan Hidup dengan indikator Angka Harapan Hidup tercapai sebesar 100,40% (Predikat Capaian Melebihi Target) dengan rentang nilai >100%
- II. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan indikator Nilai SAKIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tercapai sebesar 100,07% (Predikat Capaian Melebihi Target) dengan rentang nilai >100%.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2025 Dinas Kesehatan Kota Balikpapan ini tersaji sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas dari implementasi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta rencana aksi yang termuat dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Keberhasilan ini tentunya adalah hasil kinerja yang dapat disajikan atau yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Kesehatan Kota beserta jajarannya sampai kepada layanan yang diberikan oleh UPTD binaan (Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Instalasi Farmasi Kota dan Laboratorium Kesehatan Daerah). Sinergi dengan komitmen yang tinggi dari seluruh tim kerja mulai dari tingkat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan sampai kepada UPTD Binaan terkait tidak hanya program dan kegiatan yang bersifat rutin saja melainkan segenap program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target program disertai beragam kegiatan inovatif di dalamnya. Hal tersebut

terbukti secara riil di lapangan signifikan menjadi daya ungkit pencapaian target kinerja yang telah diperjanjikan dan tentunya sangat memberi manfaat bagi peningkatan status kesehatan masyarakat di Kota Balikpapan.

4.2 Rekomendasi

Solusi yang diambil sebagai langkah – langkah rencana tindak lanjut adalah :

1. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi segenap program dan kegiatan secara simultan dan berkesinambungan secara periodik (bulanan, triwulanan dan tahunan).
2. Perencanaan kinerja dan anggaran terus ditingkatkan dari sisi kualitas anggaran yang berbasis kinerja (berbasis masalah) sesuai metode HITS (Holistik, Integral, Tematik dan Spasial).
3. Peningkatan koordinasi dan konsolidasi lintas program, lintas sektor pemerintah dan swasta serta stakeholder lainnya.
4. Pemenuhan SDM kesehatan dan penunjang kesehatan sesuai dengan kompetensi dalam rangka mendukung kinerja secara profesional.
5. Fokus kepada janji kinerja sinergi dengan rencana kerja yang termuat dalam rencana strategis Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
6. Adaptif terhadap perubahan regulasi/kebijakan yang ada baik dari Pusat, Provinsi maupun Regional (Kota).
7. Ketepatan dan ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan sebagai database dalam menentukan kebijakan berikutnya.

Balikpapan, 27 Februari 2026

Kepala Dinas Kesehatan,



Alwiati

LAMPIRAN